

ABSTRACT

THE ROLE OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE AGENCIES IN IMPLEMENTING COACHING SCHOOL EXECUTIVE

(Nanda Amalia Mirza, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The purpose of this study to describe the role of education quality assurance agency in implementing the guidance at school which has been implementing the 2013 curriculum for high school level in the port Bandar Lampung academic year 2014/2015. The aim is the role of education quality assurance agency for socialization, supervision, and evaluation of curriculum in 2013.

The research method used in this research was descriptive quantitative research subject is the high school principal in Bandar Lampung which has been implementy the 2013 curriculum. To collect research data using technical questionnaires and documentation. Reliability testing using percentages. The results of this study indicate education quality assurance agency was instrumental in fostering the implementation of the curriculum 2013.

Keywords : guidance in school, the implementation of the curriculum in 2013, the role of education quality assurance agency,

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DI SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM

(Nanda Amalia Mirza, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 tingkat SMA di Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015. Tujuan dan maksud adalah peranan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan terhadap sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi kurikulum 2013.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah SMA Bandar Lampung yang menggunakan kurikulum 2013. Untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket, dan dokumentasi. Uji reliabilitas menggunakan persentase. Hasil dari penelitian ini menunjukkan lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat berperan dalam pembinaan pelaksanaan kurikulum 2013.

Kata kunci : Pelaksanaan Kurikulum 2013, pembinaan di sekolah, Peranan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka didalam penyusunannya memerlukan landasan atau pondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.

Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional. Kurikulum itu dipandang memiliki sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan.

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 dan kurikulum terbaru yang akan diterapkan di tahun ajaran 2013/2014. Sebelum pelaksanaan penerapan kurikulum 2013 ini, pemerintah melakukan uji publik untuk menentukan kelayakan kurikulum ini di mata publik. Kemudian pada akhirnya di tahun 2013 akan mulai diberlakukan kurikulum ini secara bertahap.

Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan identifikasi Masalah tersebut maka pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada:

Peranan LPMP dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 tingkat SMA di Kota Bandar Lampung Tahun pelajaran 2014-2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat".

Maurice Duverger,(2010: 103) berpendapat bahwa Istilah "peran" (*role*) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana diya hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Pengertian LPMP

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Lembaga ini merupakan UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

Sebagai lembaga penjaminan mutu, LPMP telah memiliki sejumlah tenaga struktural dan tenaga fungsional, fasilitas, dan berbagai program. LPMP juga memiliki visi, misi, dan tujuan, serta tugas pokok dan fungsi yang diformulasi sesuai dengan kebutuhan pemekaran organisasi dan manajemen pada era otonom. Semua ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan pengembangan berbagai kebijakan, program dan kegiatan lembaga yang mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja yang terus berkembang, dan diharapkan kedepan LPMP mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional. LPMP dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 4 Juli 2003 nomor 087/O/2003 dan surat nomor 044/O/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang organisasi dan tata kerja LPMP, surat keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara No.127.1/M/PAN/2003 tanggal 30 April 2003 tentang persetujuan pendirian Lembaga Penjamin Mutu, kepmen diknas No.087/O/2003 Tanggal 4 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja LPMP, Permen Diknas No.49/0/2008 tentang rincian tugas unit kerja dilingkungan LPMP.

Kedudukan, tugas dan fungsi LPMP

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 1 kedudukan LPMP yaitu :

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut

LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. LPMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 2 tugas LPMP yaitu :

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 3 fungsi LPMP yaitu :

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.

3. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Susunan Organisasi LPMP

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 4 susunan organisasi LPMP yaitu Kepala, Subbagian Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengertian Kurikulum 2013

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya

bangsa dan Negara Indonesia sepanjang zaman.

Dari sekian banyak sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Murray Print (1993:5) kurikulum adalah semua kesempatan belajar yang dilaksanakan untuk peserta didik disekolah dan institusi pendidikan lainnya. Selain itu, kurikulum juga dapat dimaknai sebagai rancangan pengalaman yang akan diperoleh peserta didik ketika kurikulum tersebut diimplementasikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan perancangan kegiatan interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya yaitu interaksi dengan diri sendiri seperti guru, dengan sumber belajar dan lingkungan belajar lainnya. Rancangannya selalu disusun dalam dokumen tertulis dan dilaksanakan serta dikendalikan oleh guru.

Wina Sanjaya (2008:6) juga memberikan pengertian kurikulum yang mirip dengan Murray Print. Ia menyebutkan bahwa kurikulum adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Untuk mengembangkan kurikulum, kegiatannya meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi yang telah disusun.

Nasution (1993:8) menyebutkan empat komponen pokok kurikulum yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Subandijah yang dikutip Abdullah Idi (2007:8) menyebutkan komponen kurikulum atas lima komponen ditambah komponen penunjang, yaitu tujuan, isi atau materi, organisasi/strategi, media dan proses belajar mengajar.

Abdullah Idi (2007:19) memberi rambu-rambu tentang tugas para pengembang kurikulum dalam kajian sosiologi yaitu :

- a. Mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah, dan lain-lain.
- b. Menganalisis masyarakat dimana sekolah berada.
- c. Menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja.

- d. Menginterpretasi kebutuhan individu dalam ruang lingkup kepentingan masyarakat.

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada Tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Dari pengertian beberapa para ahli mengenai kurikulum dapat saya simpulkan bahwa kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu pendidikan yang diinginkan dengan seperangkat rencana yang telah disiapkan.

Landasan Penyusunan Kurikulum

1. UU.No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 36 ayat 2
“kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik”.
Pasal 38 ayat 2
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya

- oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah dibawah kordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidknas
Pasal 17 ayat 1
SD/MI/SDLB,SMP/MTs/SMP LB/MA/SMALB,SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.
 3. Permen Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang standar isi.
 4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.
 6. Permendikbud No.54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi.
 7. Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
 8. Permendikbud No.66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
 9. Permendikbud No.67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah.
 10. Permendikbud No.81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
 11. SK Kakanwil Depdikbud Provinsi Lampung No.2694/1.112A/U/1994 Kurikulum Muatan Lokal untuk sekolah dasar/madrasah.
 12. Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2011 tentang pengembangan Bahasa Daerah Lampung dan Aksara Lampung.
 13. Permendikbud No.64 tentang Standar Isi.
 14. Peraturan daerah yang relevan,SK Kakanwil depdikbud Provinsi Lampung No.4 Tahun 2011 tentang Aksara Lampung dan pembelajaran Seni Budaya Lampung.

Tujuan Kurikulum 2013

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara singkatnya undang-undang tersebut berharap pendidikan dapat membuat peserta didik menjadi kompeten didalam bidangnya. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah disampaikan diatas, harus mencakup kompetensi dalam ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 35 undang-undang tersebut.

Dengan demikian kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan instan Indonesia supaya hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan kurikulum 2013 yang ideal adalah para guru mampu mengimplementasikan penerapan kurikulum 2013 dikelas kepada murid setelah pelatihan yang dilakukan oleh LPMP. LPMP lah yang bertugas sebagai sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peranan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan pada pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Bandar Lampung Tahun 2014-2015.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut M. Ali (1985: 120) metode deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi dengan analisa pengolahan data, kemudian menarik suatu kesimpulan dengan suatu tujuan utama membuat suatu penggambaran tentang situasi dan keadaan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menentukan untuk segera dicarikan jalan keluarnya.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yang ditunjuk pemerintah menjadi SMA pelaksana kurikulum 2013 di kota Bandar Lampung.

Variabel Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu Variabel Bebas dan Variabel Terikat, Meliputi:

- a. Variabel bebas adalah Peranan LPMP (X)
- b. Variabel Terikat adalah pelaksanaan kurikulum 2013 (Y)

Definisi Konseptual

Untuk lebih jelas memahami suatu permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan secara konseptual sebagai berikut:

Peranan LPMP

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai satuan organisasi terdepan Depdiknas yang berada di setiap provinsi, diproyeksikan untuk mampu mengembangkan tugas-tugas pelayanan Depdiknas terhadap penjaminan mutu pendidikan di daerah otonom.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2005 tanggal 4 Juli 2003, sebelum terbit keputusan itu, LPMP Provinsi Lampung bernama Balai Penataran Guru (BPG) Lampung.

Pelaksanaan Kurikulum 2013

Pelaksanaan kurikulum 2013 adalah suatu tindakan untuk mencapai sasaran dengan pelaksanaan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Yang diinginkan dapat menjadikan generasi penerus yang unggul.

Definisi Operasional

Peranan LPMP

Sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, menyatakan bahwa kegiatan supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada satuan atau program pendidikan harus bekerja sama dengan mengikuti arahan dan binaan LPMP untuk pendidikan formal.

Beberapa hal yang dapat dilakukan LPMP dalam membantu peranan para pengawas sekolah adalah

1. Memberikan bantuan teknis berupa pendidikan dan pelatihan tentang supervisi pendidikan (akademik dan manajerial).
2. Memfasilitasi dinas, para pengawas sekolah untuk menyusun instrument kepengawasan yang terstandar.
3. LPMP harus dapat menjadi badan yang berkompeten dalam merekrut dan menguji pengawas sekolah secara psikologis dan akademik dengan mengeluarkan sertifikat kepengawasan (educational audit certificate)

Pelaksanaan Kurikulum 2013

Pada kurikulum 2013, istilah standar kompetensi tidak dikenal lagi. Namun muncul istilah kompetensi inti. Kompetensi inti di gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah. Di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dsb, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika.

Rencana Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah *scoring* pada alternatif jawaban dalam lembaran angket yang disebarkan kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini.

Teknik Pokok

Angket

Teknik angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan responden dengan maksud untuk menjangkau data dan informasi dari responden yang bersangkutan. Sasaran angket adalah seluruh kepala sekolah SMA pelaksana kurikulum 2013 di Bandar Lampung. Angket yang digunakan adalah angket langsung tertutup, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing..

Teknik Penunjang

Wawancara

Wawancara dibuat berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden secara langsung. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bepedoman yaitu peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang secara langsung diberikan oleh pegawai LPMP. Dalam wawancara ini hal-hal yang ditanyakan adalah mengenai peranan LPMP dalam pelaksanaan kurikulum 2013.

Observasi

Teknik ini dilakukan untuk melihat keadaan tempat penelitian dengan melakukan pengamatan pencatatan terhadap masalah-masalah yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengamati subyek penelitian dilingkungan LPMP Lampung.

Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yaitu suatu pengambilan data yang diperoleh dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan-keterangan tentang sesuatu yang diteliti.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka alat ukur yang digunakan harus valid, maksudnya alat ukur tersebut harus dapat mengukur secara tepat. "Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalihan sesuatu instrumen" (Suharsimi Arikunto, 2010:144). Dalam hal ini alat ukur yang dimaksud adalah angket, yang disajikan berdasarkan konstruksi teoritisnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah cukup baik sehingga mampu menggunakan data yang terpercaya,

maka sebelum di uji coba, langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan uji coba angket diluar responden
2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item genap ganjil

Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan *product moment* Kemudian untuk mengetahui reliabilitas seluruh quisioner digunakan rumus *Spearman Brown*.

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan rumus Interval

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator sosialisasi LPMP dalam pelaksanaan kurikulum 2013

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 7 responden, data frekuensi dengan jumlah 7 atau seluruh responden menyatakan sangat berperan.

Pengawasan LPMP dalam pelaksanaan kurikulum 2013

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa dari 7 responden 4 (57,14%), menyatakan bahwa peranan LPMP sangat berperan, maksudnya bahwa peranan LPMP dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 di tingkat SMA di kota Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 melalui pengawasan sangat berperan. Selanjutnya 3

(42,86%) menyatakan bahwa peranan LPMP kurang berperan.

Evaluasi LPMP dalam pelaksanaan kurikulum 2013

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 7 responden, data frekuensi dengan jumlah 7 atau seluruh responden menyatakan sangat berperan.

Isi materi kurikulum 2013

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa dari 7 responden 5 (71,43%), menyatakan bahwa peranan LPMP sangat berperan, maksudnya bahwa peranan LPMP dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 di tingkat SMA di kota Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 sangat berperan dalam penjelasan isi materi kurikulum 2013. Selanjutnya 2 (28,57%) menyatakan bahwa peranan LPMP kurang berperan, maksudnya bahwa peranan LPMP dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 di tingkat SMA di kota Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 kurang berperan dalam penjelasan isi materi kurikulum 2013.

Rambu-rambu kurikulum 2013

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa dari 7 responden 2 (28,57%), menyatakan bahwa peranan LPMP sangat berperan dalam penyampaian Rambu-rambu kurikulum 2013, maksudnya bahwa peranan LPMP dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 di tingkat SMA di kota Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 sangat berperan dalam

penyampaian Rambu-rambu kurikulum 2013. Selanjutnya 5 (71,43%) menyatakan bahwa peranan LPMP kurang berperan, maksudnya bahwa peranan LPMP dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 di tingkat SMA di kota Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 kurang berperan dalam penyampaian Rambu-rambu kurikulum 2013.

Media dan strategi pembelajaran kurikulum 2013

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 7 responden, data frekuensi dengan jumlah 7 atau seluruh responden menyatakan sangat berperan. Bahwa peranan LPMP dalam melaksanakan pembinaan di sekolah pelaksana kurikulum 2013 di tingkat SMA di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 sangat berperan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Peranan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Melaksanakan Pembinaan di Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tingkat SMA di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 menyatakan bahwa LPMP sangat berperan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang mana dapat kita lihat dari angket yang telah disebar dan hasil wawancara beberapa kepala sekolah SMA pelaksana kurikulum 2013 di Kota Bandar Lampung.

Sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung sekaligus SMA pelaksana kurikulum 2013 dalam kaitanya dengan peranan LPMP, seluruh kepala sekolah telah memahami dengan kurikulum 2013. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data dimana pemahaman kepala sekolah tentang peranan LPMP seluruh kepala sekolah (90%) masuk dalam kategori paham.

Selain itu, tanggapan kepala sekolah tentang peranan LPMP juga masuk dalam kategori sangat berperan. Sebanyak 7 Kepala sekolah atau seluruh kepala sekolah (90%) yang menunjukkan bahwa kepala sekolah menyatakan bahwa LPMP sangat berperan dalam melakukan pembinaan kurikulum 2013 di setiap sekolah.

Kepala sekolah pun berharap agar LPMP lebih berperan aktif lagi terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 yang isunya akan dipakai di setiap sekolah nantinya. Tidak hanya dalam pelaksanaan kurikulum 2013 saja akan tetapi harus berperan aktif dalam hal apapun terutama penjaminan mutu pendidikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Sekolah Dengan menjadi SMA pelaksana kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi contoh SMA yang belum menerapkan kurikulum 2013 di sekolahnya.

2. Kepada Pemerintah pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi sekolah agar dengan kondisi sekolah yang baik dapat berjalan juga kurikulum 2013 yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah didalam lingkup pendidikan dan tidak menimbulkan masalah baru.

Hendaknya pemerintah juga lebih melakukan analisis kebutuhan, memetakan kondisi lapangan serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik saat membuat suatu peraturan atau kebijakan agar nantinya didalam pelaksanaan peraturan atau kebijakan tersebut akan berjalan lebih efektif dan efisien.

3. LPMP

LPMP harus lebih menjadi lembaga yang peranannya sangat baik bagi sekolah-sekolah. Tidak hanya dalam penerapan kurikulum 2013 saja akan tetapi dalam segala hal menyangkut penjaminan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

Ali, M. 1985. *Pengantar pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Duverger, M. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Idi, Abdullah. 2007. *Mindset Kurikulum 2013*. Bandung: Alfabeta

Nasution. 1993. *Mindset Kurikulum 2013*. Bandung: Alfabeta

Print, M. 1993. *Mindset Kurikulum 2013*. Bandung: Alfabeta

Sanjaya. 2008. *Mindset Kurikulum 2013*. Bandung: Alfabeta

Sari, DW. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.